

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara luas beriklim tropis yang memiliki beragam kekayaan alam. Beberapa masyarakat memanfaatkan kekayaan alam Indonesia sebagai sumber mata pencaharian, salah satu diantaranya adalah pertanian. Berdasarkan potensi yang dimiliki, sektor pertanian masih menjadi sektor dominan terhadap ekonomi negara. Dilansir dari website databoks.katadata.id, dijelaskan bahwa pertanian saat ini menjadi penopang Produk Domestik Bruto terbesar kedua di Indonesia dengan menyumbang kontribusi mencapai 13,28% (Kusnandar, 2022). Sektor pertanian menjadi penopang pembangunan berpotensi untuk menjadi sektor perencanaan pembangunan di masa depan.

Sektor pertanian berhubungan dengan hasil-hasil sumber daya alam yang menyangkut komoditas pangan sehingga menjadi pusat perhatian bagi pemerintah tersendiri. Mengenai pembahasan terkait kebutuhan hidup, pangan sudah menjadi perihal utama yang harus setiap waktu terpenuhi. Tanaman pangan termasuk kedalam komoditas yang penting dan strategis karena merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, bahkan dalam kondisi krisis sekalipun (Sari, 2010). Salah satu komoditas utama tanaman pangan di Indonesia adalah beras. Selain menjadi sumber pemenuhan kebutuhan pangan, beras juga dijadikan sebagai mata pencaharian tersendiri bagi petani. Hal tersebut akan menjadikan komoditas beras berpengaruh besar dalam kestabilan perekonomian nasional, ketahanan pangan, serta stabilitas politik nasional (Candraningtyas, Jati, Fadhlullah, Fauzan, & Suhesti, 2021).

Produksi padi di D.I. Yogyakarta memiliki peran yang berpengaruh dalam kecukupan pangan di Indonesia. Pada tahun 2021, produktivitas padi se provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 51,77 ku/ha, angka tersebut berada pada urutan ke-9 dari sepuluh provinsi dengan produktivitas padi yang terbesar di

Indonesia. Luas panen padi konvensional se-D.I. Yogyakarta pada tahun 2019 sebesar 111,48 ribu hektar dan tahun 2020 lebih rendah 0,93 ribu hektar atau sebesar 110,55 ribu hektar. Produksi padi konvensional pada kedua tahun yang sama juga mengalami penurunan sebesar 1,89 persen atau sebanyak 10,08 ribu ton. Pada tahun 2019 menghasilkan 533,48 ribu ton sedangkan tahun 2020 menghasilkan 523,40 ribu ton. (BPS D.I. Yogyakarta, 2021). Dari kelima kabupaten/kota se-DIY, selain wilayah Kota Yogyakarta dapat disebut sebagai pemasok beras se-DIY dikarenakan hasil produksi padi yang masuk dalam kategori cukup tinggi. Termasuk diantaranya yaitu Kabupaten Sleman dengan hasil produksi padi konvensional meliputi Padi Sawah dan Padi Ladang sebagai berikut:

Tabel 1. Produksi Padi Konvensional di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2021

Sub Sleman			
	2019	2020	2021
Padi Sawah			
Luas Tanam (ha)	-	-	-
Luas Panen (ha)	41.577,0	41.143,5	42.012,0
Produksi Gabah (ton)	244.507,0	245.291,8	253.708,0
Produksi Beras (ton)	154.428,4	155.024,5	154.428,4
Produktivitas (ku/ha)	58,8	59,6	60,4
Padi Ladang			
Luas Tanam (ha)	1.607,0	477,0	461,0
Luas Panen (ha)	477,0	477,0	461,0
Produksi Gabah (ton)	1.607,0	1.569,3	1.627,0
Produksi Beras (ton)	1.015,9	991,6	35.502,0
Produktivitas (ku/ha)	33,7	32,9	35,3

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2022

Pada masa pemerintahan orde baru, jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan secara drastis. Kenaikan jumlah penduduk secara langsung akan meningkatkan kebutuhan pangan. Pada masa tersebut, ketersediaan pangan tidak mampu menyesuaikan dengan ledakan penduduk sehingga menjadi sebuah masalah baru. Upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat dikarenakan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Oleh karena itu muncul teknologi bernama *Green Revolution* atau bisa disebut dengan Revolusi Hijau. Revolusi Hijau

menggunakan ilmu terapan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian secara nyata. Berdasarkan ilmu terapan teknologi pada masa tersebut, pertanian ini menggunakan bibit unggul, penggunaan zat-zat kimia terutama pada pupuk dan pestisida, serta penerapan mekanik pada kegiatan-kegiatan pertanian. Datangnya revolusi hijau di Indonesia terjadi pada masa pemerintahan orde baru. Gerakan revolusi hijau di Indonesia menggunakan beras sebagai komoditas strategis sehingga antara tahun 1984 – 1989, Indonesia sanggup untuk menjadi negara berswasembada beras walaupun sementara. Gerakan ini tidak berlangsung lama, diakibatkan munculnya permasalahan baru sebagai dampak dari revolusi hijau, yaitu terjadinya degradasi lahan. Degradasi terjadi akibat bahan kimia yang masuk ke lahan menguras unsur-unsur hara dan menurunkan kesuburan tanah dikarenakan petani yang menggunakannya secara *overintensive*. Bahan-bahan kimia yang tidak terkontrol dapat membahayakan petani dan masyarakat dalam jangka panjang (Dirjen TP Kementan RI, 2015).

Pemerintah mengambil tindakan untuk mengangkat kembali pertanian organik untuk dikembangkan karena bermanfaat secara ekologis. Sistem pertanian organik dapat memperbaiki kualitas lahan yang terdegradasi akibat budidaya pertanian konvensional. Sistem ini juga mencegah resiko dari residu zat kimia sehingga kualitas pangan Indonesia menjadi sehat dan berkualitas.

Berlangsungnya sistem pertanian organik yang diterapkan tentunya memiliki standar produksi agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Pertanian organik sendiri adalah salah satu upaya untuk mendukung kelestarian lingkungan (Badan Standardisasi Nasional, 2016). Diharapkan dengan adanya sistem pertanian organik, dapat menekan biaya-biaya input bagi petani khususnya penggunaan pestisida dan pemupukan yang penyediaannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit (Charina, Kusumo, Sadeli, & Deliana, 2018), sehingga dalam menjaga kualitas dari produk pertanian organik perlu bagi petani untuk mengikuti *Standard Operational Procedure* (SOP) yang berisi mengenai syarat-syarat yang berlaku dalam sistem pertanian organik agar tercapai *Good Agriculture Practice* (GAP) atau bisa disebut sebagai praktik

pertanian yang baik. GAP merupakan konsep atau panduan yang berlaku sebagai penjamin akan kesejahteraan petani sebagai produsen produk pertanian agar menghasilkan produk yang aman dan berkualitas untuk dikonsumsi (Shofi, Agustina, & Subekti, 2019).

Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (UPTD BP4) merupakan unit dasar yang menjadi penghubung atau perantara utama baik bagi petani kepada Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan maupun sebaliknya. UPTD BP4 dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bekerja sebagai unsur pelaksana tugas teknik operasional pada Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan. (Perbup Ketapang No. 22 TAHUN 2018, 2018). Didirikannya UPTD ini bertujuan untuk pembangunan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Sleman. Terdapat dua belas UPTD BP4 yang tersebar di Kabupaten Sleman beserta wilayah yang diliputinya.

Berbagai program-program penyuluhan pertanian organik sebenarnya sudah banyak diberikan kepada petani. Namun pada kenyataan secara langsung di lapangan, para petani yang tergabung di kelompok tani tidak sepenuhnya menerapkan berbagai himbauan yang diberikan penyuluh. Seperti contoh, petani masih menggunakan bahan kimia sebagai pupuk dan pestisida, tentu hal tersebut sangat tidak sesuai dengan SOP Pertanian Organik. Dalam menentukan keputusannya, petani akan dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang dimiliki (Charina et al., 2018). Selama menanggapi perubahan atau inovasi, biasanya petani menyesuaikan dengan kemauan dan kemampuannya saja, diluar dari itu selama tidak memiliki masalah berarti pada hasil panen, petani cenderung memilih untuk melakukan dengan caranya sendiri atau bahkan mengabaikan apabila bertolak secara rasional. Hal tersebut menandakan bahwa petani memiliki kecenderungan terhadap zona nyaman dan takut akan mengambil resiko. Berdasarkan uraian diatas, bagaimana tingkat penerapan SOP usahatani padi organik?, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi petani dalam penerapan SOP GAP usahatani padi organik?.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat penerapan SOP-GAP usahatani padi organik di Kecamatan Seyegan
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SOP-GAP usahatani padi organik.

C. Kegunaan Penelitian

1. Bagi petani

Kegunaan penelitian ini bagi petani adalah hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih kepada petani atau kelompok tani mengenai SOP GAP usahatani padi organik.

2. Bagi pemerintah

Kegunaan penelitian ini bagi pemerintah adalah hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan untuk membuat kebijakan atau melakukan penyuluhan kepada petani mengenai usahatani padi organik sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dimiliki petani.

3. Bagi peneliti lain

Kegunaan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian lain terutama yang bergerak dalam bidang pertanian untuk membantu penelitiannya.